

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945 yang berdampak terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Kekuasaan Jepang atas Indonesia berakhir setelah berkuasa selama kurang lebih 3,5 tahun yaitu dari tahun 1942-1945 (Atmakusumah, 1982:67). Tahap demi tahap pasukan Jepang ditarik mundur dari Indonesia. Tentara sekutu dibawah pimpinan Jendral Christison kemudian mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dengan tujuan utama melucuti persenjataan tentara Jepang. Sekutu yang datang ternyata diboncengi oleh NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) yang ingin berusaha kembali berkuasa di Indonesia.

Proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno sebagai wujud pernyataan kemerdekaan tidak sedikitpun dihiraukan oleh Belanda. Belanda masih menginginkan kekuasaan di negeri yang kaya akan potensi sumber daya alam ini. Gesekan antara Belanda dengan rakyat Indonesia pun tidak dapat dihindarkan. Pada bulan Oktober, November dan Desember 1945, Jakarta menjadi ajang kekerasan dan terror dari tentara sekutu maupun NICA yang memancing insiden dimana-mana dan kapan saja, sehingga ribuan orang menjadi korban. Hal ini bahkan menyebabkan penduduk menutup pintu rumahnya sejak senja hari. Sidang kabinet tanggal 3 Januari 1946 memutuskan untuk memindahkan kedudukan pemerintah pusat RI ke Yogyakarta. Yogyakarta merupakan suatu wilayah yang terletak di pedalaman Jawa, tepatnya pada bagian tengah sisi selatan Pulau Jawa. Sebelum menggabungkan diri dibawah RI, Yogyakarta merupakan suatu Kesultanan yang merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram Islam, dimana Mataram Islam sendiri menurut Persetujuan Giyanti terbagi menjadi dua bagian, yakni Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Menurut Sutrisno Kutoyo (1996:158), berdasarkan catatan sejarah pada tanggal 13 Maret 1755 tepat satu bulan setelah perjanjian Giyanti yang ditandatangani tanggal 13 Februari 1755, Pangeran Mangkubumi memproklamirkan berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun tersebut. Sejak saat itulah ditetapkan sebagai hari kelahiran Kesultanan Yogyakarta sekaligus Yogyakarta sebagai ibukotanya.

Perjuangan Sultan Hamengkubuwono IX terhadap Republik Indonesia tidak terlepas dari jiwa optimis dan demokratisnya. Perpaduan corak pendidikan Dorodjatun (nama sebelum diangkat menjadi raja), yaitu pendidikan modern dan pendidikan tradisional di dalam keraton dapat membentuk jiwa demokratis dan optimis. Pendidikan modern dapat membuka wawasan luas secara global dan disertai watak kepribadian Jawa yang menjunjung nilai-nilai ketimuran selalu melekat pada sosok Sultan Hamengkubuwono IX (Sunoyo, 2016:39). Keputusan terhadap Republik Indonesia dan Kasultanan Yogyakarta terlihat ketika Indonesia merdeka. Pada saat itu diperlukan suatu keputusan yang tepat untuk kelangsungan Republik Indonesia dan Kasultanan Yogyakarta.

Menurut Baskoro dan Sunaryo (2011:39), Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disambut baik oleh Sultan Hamengkubuwono IX sebagai raja Kasultanan Yogyakarta. Sebelum Republik Indonesia Merdeka, sebenarnya Kasultanan Yogyakarta telah menjadi Negara yang berdaulat. Kasultanan Yogyakarta telah memiliki organisasi pemerintahan, rakyat, dan wilayah kekuasaan. Keadaan tersebut memenuhi syarat sebagai suatu wilayah yang dapat memutuskan kemerdekaannya sendiri. Namun sebaliknya, setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, keputusan Sultan Hamengkubuwono IX adalah mendukung Republik Indonesia dan menjadikan Kasultanan Yogyakarta berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Kondisi di Jakarta pada saat itu sedang berada dalam ancaman Belanda, pasukan Belanda berusaha untuk menghancurkan kekuatan Republik Indonesia dan menahan para pemimpin Republik Indonesia dengan dalih menghapuskan segala sesuatu yang berbau Jepang (Abdullah dan Lopian, 2012:196). Keamanan dan keselamatan di ibu kota Republik Indonesia semakin tidak terjamin, maka tanggal 4 Januari 1946 pemerintah memindah ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Presiden Soekarno yang berangkat menggunakan kereta api akhirnya sampai di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1946. Kedatangan Soekarno dan rombongan disambut Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII. Pindahan ibukota ke Yogyakarta membawa konsekuensi bahwa mulai saat itu Yogyakarta menjadi pusat pertahanan dan pemerintahan Republik Indonesia. Hubungan antara keduanya pun mulai terjalin. Hubungan yang baik itu dapat dipahami bahwa Sri Sultan ikhlas tanpa mengharap sesuatu apapun kecuali bangsa Indonesia menjadi merdeka dan Republik Indonesia dapat lestari. Adams, (2014:284)

Menurut Sutrisno Kutoyo, (1996:158) Sebelum dinobatkan menjadi Raja, Sri Sultan bernama Gusti Raden Mas Dorodjatun, lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912, dan naik tahta menggantikan ayahnya pada tanggal 18 Maret 1940. Sebagai seorang raja yang masih berusia relatif sangat muda, banyak pihak menaruh harapan terhadap munculnya suatu fajar baru dalam Keraton Yogyakarta. Pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda masih bercokol di Indonesia, dimana Gubernur untuk wilayah Yogyakarta adalah Lucian Adams. Seperti para sultan sebelumnya, sebelum menjabat sebagai raja, maka terlebih dahulu diwajibkan menandatangani kontrak perjanjian dengan pemerintah Hindia Belanda, dimana kontrak tersebut pada dasarnya merupakan kekangan terhadap kekuasaan sultan yang berkuasa. Masa antara penobatan Sri Sultan dengan menyerahnya Belanda atas Jepang tak berselang lama, hanya sekitar dua tahun (1940-1942). Setelah itu Yogyakarta berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Kekuasaan Jepang ternyata juga tidak berlangsung lama, dimana disela-sela kekalahan Jepang atas Sekutu itulah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan RI, hingga kemudian Sri Sultan beserta rakyat Yogyakarta berdiri di bawah naungan Proklamasi RI itu Ahmad Adaby Darban, (1998:87).

Konflik RI-Belanda setelah kedatangan kembali pemerintah Hindia Belanda ternyata mendapat tanggapan dari dunia internasional. Inggris mendesak segera diadakannya perundingan gencatan senjata sebelum menarik semua pasukan mereka dari Jawa dan Sumatera pada bulan Desember 1946. Pada tanggal 12 November 1946 Indonesia untuk pertama kali diakui secara *de facto* dalam Perundingan Linggarjati. Hal ini merupakan alasan bagi beberapa negara adikuasa seperti Inggris dan AS untuk mengakui Indonesia secara *de facto*, menyusul beberapa negara seperti Mesir dan Yordania yang telah memberi pengakuan *de facto* dan *de jure* sebelum perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda mengingkari Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan militer yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda Pertama. Terjadinya peristiwa ini membuat Dewan Keamanan PBB turun tangan dengan membentuk *Commitee of Good Offices* (Komisi Jasa Baik) yang terdiri dari wakil-wakil dari AS, Australia dan Belgia dalam upaya penyelesaian masalah tersebut M.C. Ricklefs, (1991:337).

Akhirnya perundingan dimulai kembali dan Persetujuan Renville disepakati pada bulan Januari 1948. Perundingan yang dilaksanakan di atas Kapal USS Renville tersebut ternyata belum final, masih dilanjutkan dengan perundingan-perundingan yang lain. Tuntutan-tuntutan Belanda atas RI semakin kuat dan menekan. Belanda menuntut pembubaran TNI, salah satu atribut kedaulatan dan kemerdekaan RI yang utama.

Belanda sangat tangkas melakukan perang totalnya, walaupun dalam kondisi gencatan senjata. Mereka terus menyerang dalam bidang politik dan ekonomi untuk meruntuhkan Republik Indonesia. Kebuntuan antara kedua belah pihak membawa Belanda pada keputusan untuk melaksanakan aksi militer yang sesungguhnya pada tanggal 19 Desember 1948, dimana hal tersebut dikenal dengan Agresi Militer Belanda Kedua. Pasukan Belanda mulai menyerang Yogyakarta dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Mula-mula mereka melumpuhkan lapangan udara Maguwo yang akan digunakan untuk pendaratan pasukan mereka. Pesawat pembom dan penembak roket Belanda P. 51 dan Spitfires mulai menjinakkan Yogyakarta dengan serangan yang dilakukan oleh Brigade Marinir Belanda A.H. Nasution, (1979:165)

Kekuatan militer Belanda secara cepat dapat menguasai Kota Yogyakarta. Kabinet RI segera bersidang untuk membahas serangan Belanda tersebut. Sebelum Presiden, Wakil Presiden beserta petinggi-petinggi yang lain ditawan oleh Belanda, dalam sidang telah diputuskan bahwa akan dibentuk pemerintahan darurat di Sumatera oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan TNI yang akan bergerilya dengan dipimpin oleh Panglima Besar Soedirman. Sementara itu Sri Sultan dibatasi gerakannya oleh Belanda terbatas hanya di Keraton saja. Menyadari hal ini Sri Sultan tidak tinggal diam. Inilah saatnya Sri Sultan memimpin perlawanan terhadap Belanda, meski dalam upaya tersebut Sri Sultan berperan sebagai pengatur strategi di Keratonnya. Pelaksana-pelaksana di lapangan dipimpin oleh Letkol Soeharto, dimana ia berperan sebagai pemimpin dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Sri Sultan juga tetap berkomunikasi dengan pejuang-pejuang yang lain, meski hanya melalui para kurir yang menyamar sebagai abdi dalem ketika keluar dan masuk Keraton G.M. Kahin,(427).

Dengan melihat uraian latar belakang di atas, maka akan tampak peranan Sri Sultan dalam perjuangan revolusi di Indonesia, terutama pada masa Agresi Militer Belanda II. Sri Sultan berperan penting dalam perjuangan bersama tokoh-tokoh lain sehingga kemerdekaan RI dapat dipertahankan. Jiwa nasionalis Sri Sultan dapat menjadi contoh yang baik untuk generasi masa kini yang sedikit demi sedikit terkikis semangat kebangsaannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut. Akan tetapi bagaimanakah detail Perjuangan Sri Sultan belum diketahui secara jelas sehingga perlu penelusuran lebih jelas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi keterlibatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Agresi Militer Belanda Kedua?
2. Bagaimanakah Bentuk Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada Agresi Militer Belanda Kedua?
3. Bagaimanakah makna Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan RI?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Mengembangkan kemampuan berfikir secara kritis, analitis, objektif dalam mengkaji suatu peristiwa.
- b. Mengembangkan serta menambah karya penulisan ilmiah, terutama dalam bidang penulisan sejarah.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi keterlibatan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Agresi Militer Belanda Kedua.
- b. Mendeskripsikan Bentuk Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada Agresi Militer Belanda Kedua.
- c. Menganalisis makna Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan RI.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Pembaca

- a. Memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kemerdekaan RI, khususnya pada masa Agresi Militer Belanda Kedua (1948).
- b. Sebagai sumbangsih bagi dunia pendidikan yang tercermin dari ketokohan seorang pejuang Sri Sultan Hamengku Buwono IX

1.4.2 Bagi Penulis

- a. Menambah pengetahuan mengenai perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan RI, khususnya pada saat Agresi Militer Belanda Kedua
- b. Guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.5. Pejelasan Konsep

Untuk menghindari terjadinya penafsiran dan dugaan yang salah terhadap penelitian yang berjudul “Perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Agresi Militer Belanda Ke II Dalam Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia”, maka perlu untuk memberikan penjelasan konsep. Adapun konsep yang berhubungan dengan judul sebagai berikut:

1.5.1 Perjuangan

Perjuangan adalah suatu usaha untuk merebut sesuatu, dalam kaitannya dengan perjuangan rakyat Indonesia maka berarti usaha yang dilakukan rakyat untuk menentang penjajahan Belanda yang ada di berbagai daerah-daerah di seruh Indonesia yang tidak bersamaan waktunya (Notosutanso, 1977:133).

1) Perjuangan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Perjuangan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2) Perjuangan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Perjuangan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perjuangan adalah suatu usaha yang dilakukan atau diperbuat atau kontribusi oleh seseorang atau kelompok yang dapat berpengaruh pada suatu peristiwa dengan kerja keras yang penuh tantangan untuk meraih suatu yang ingin dicapai. Dalam tulisan ini perjuangan yang disoroti penulis adalah Perjuangan Sri Sultan Hamengkubuno IX Pada Masa Agresi Militer Belanda ke II Dalam Upaya Mempertahankan Kemerdekaan RI yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini.

1.5.2 Agresi Militer

1.5.2.1 Agresi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agresi adalah perbuatan bermusuhan yang bersifat menyerang secara fisik maupun psikis kepada pihak lain. Agresi merupakan tindakan kasar akibat kekecewaan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat ditunjukkan kepada orang lain atau benda. Buss dan Perry (1992) menyatakan perilaku agresi sebagai perilaku yang niatnya untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara psikologis. Perilaku agresi sepertinya telah menjadi sesuatu hal yang sangat biasa terjadi pada kehidupan sosial individu saat ini. Perilaku agresi adalah setiap bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau merugikan seseorang yang bertentangan dengan kemauan orang itu (Breakwell, 1998). Perilaku agresi dapat dimunculkan secara fisik maupun verbal. Perilaku agresi fisik yaitu perilaku agresi yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan secara fisik, seperti menampar, memukul, melempar dengan benda terhadap orang lain di sekitarnya. Perilaku agresi verbal yaitu perilaku agresi yang dilakukan dengan cara mengeluarkan kata-kata untuk menyerang orang lain, dapat berupa ejekan, hinaan, maupun caci maki.

Selanjutnya menurut Kartono (2003) agresi merupakan suatu ledakan emosi dan kemarahan-kemarahan hebat, perbuatan-perbuatan yang

menimbulkan permusuhan yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda. Atkinson (2000) menjelaskan agresi adalah perilaku yang secara sengaja bermaksud melukai orang lain (secara fisik atau verbal) atau menghancurkan harta benda. Agresi sendiri menurut Berkowitz (2003) selalu mengacu pada beberapa jenis perilaku, baik secara fisik maupun simbolis yang dilakukan dengan tujuan menyakiti.

1.5.2.2 Militer

Militer berasal dari kata Miles yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) yaitu: Seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara

Sedangkan menurut Dyabir Amrullah (1988:41-42) bahwa militer adalah mereka yang diberikan senjata, untuk melakukan pertempuran dalam rangka mempertahankan keamanan negara yang terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) Angkatan Udara (AU) dan POLRI.

Berdasarkan pemaparan di atas Agresi militer adalah tindakan yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain dengan melakukan penyerangan ke suatu wilayah dengan tujuan untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan sebuah negara tersebut. Contoh dari agresi militer adalah melakukan genjatan senjata dengan negara lain, memblokade jalan utama di negara lain, dan tujuan utama dari agresi militer adalah penyerangan yang menyakiti fisik dan juga non-fisik (psikis/mental)

1.5.3 Upaya

Menurut Wahyu Baskoro (2005 : 902) Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut Torsina (1987 : 4) Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1991 : 1109) mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud , memecahkan persoalan , mencari jalan keluar ,dsb); daya upaya. Sedangkan menurut Sriyanto (1994 : 7) upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu .

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa upaya adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah.

1.5.4 Mempertahankan

Pengertian mempertahankan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata mempertahankan adalah mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula. Contoh: Mempertahankan tradisi lama. Arti lainnya dari mempertahankan adalah menjaga atau melindungi supaya selamat. Contoh: Setiap warga negara berkewajiban mempertahankan negara dan bangsa.

Berdasarkan penjelasan diatas,dapat disimpulkan bahwa mempertahankan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menjaga atau melindungi sesuatu yang masih dipertahankan.Dalam tulisan ini Mempertahankan yang disoroti penulis adalah Perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono IX Pada Masa Agresi Militer Belanda ke II Dalam Upaya Mempertahankan RI.

1.5.5 Kemerdekaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka artinya bebas dari penghambaan, penjajahan, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.

Menurut Charkes G. Fenwick, kemerdekaan dapat diartikan dalam dua pengertian yaitu kemerdekaan kedalam dan keluar. Kemerdekaan kedalam meliputi dua aspek yaitu yang berkaitan dengan kebebasan dari Negara untuk mengurus masalah-masalah dalam negerinya dan masalah-masalah lain mengenai kebebasan yang dilakukannya dengan Negara-negara lain. Ada pun kemerdekaan keluar yaitu kemerdekaan yang berkaitan dengan kekuasaan terbesar dari Negara untuk menentukan hubungan yang dikehendaki denan Negara lain tanpa campur tangan dari Negara ketiga.

Dalam hal ini kemerdekaan di Indonesia tidak lepas dari perjuangan, usaha dan pengorbanan dari para pejuang untuk meraih kemerdekaan yaitu bebas dari bangsa penjajah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

Kajian teori adalah serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Kajian teori merupakan salah satu hal penting di dalam sebuah penelitian. Sebab, hal tersebut menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian.

2.1.1 Teori Kekuasaan (Machiavelli)

Gerakan Pembaharuan (renaissance) yang dipicu oleh masuknya ajaran Islam di Eropa Barat sekitar abad VII telah membuka dan mengubah cara pandang bangsa-bangsa Eropa Barat sehingga menghasilkan peradaban Barat Modern. Di bidang Politik dan kenegaraan sumber pemikiran dipengaruhi oleh ajaran Machiavelli seorang pakar ilmu politik yang berasal dari Republik Florence sebuah Negara kecil di Italia Utara sekitar abad XVII. Menurut Machiavelli, sebuah Negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil yaitu (1) dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan, segala cara dihalalkan (2) untuk menjaga kekuasaan rezim ternyata politik adu domba (*divide et impera*) adalah sah (3) dalam dunia politik (disamakan dengan kehidupan binatang buas) siapa yang kuat pasti dapat bertahan dan menang

Kekuasaan digunakan oleh penguasa sebagai medium dalam mengatur, menjalankan serta mengimplementasikan berbagai kebijakan publik yang bermuara pada kondisi kesejahteraan bersama. Pada sisi negative, kekuasaan dinilai syarat dengan taktik manipulative, tipu daya serta tindakan menghalalkan segala cara yang bertujuan untuk pengukuhan kedudukan dan kepentingan si penguasa. Machiavelli secara gamblang mengkonstruksi teori kekuasaannya berdasarkan realitas yang terjadi pada masa itu dimana Florence yang berada dalam situasi *chaos*, mengalami krisis dalam berbagai bidang kehidupan, terutama bidang politik dan tata Negara. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh intervensi gereja terhadap urusan Negara yang begitu kuat. Realitas ini menyebabkan Italia mudah dikuasai oleh bangsa-bangsa asing dan terpecah-pecah menjadi Negara bagian. Dalam kondisi seperti ini, sosok Machiavelli hadir dan memberikan tindakan solutif dalam rangka mempersatukan kembali Negara Italia. Alternatif yang ditawarkan adalah kekuasaan yang dipegang dan dikendalikan oleh seorang penguasa secara keras dan tegas. Penguasa boleh bertindak

apa saja, asalkan bertujuan untuk mengintegrasikan Negara. Baginya, tindakan seorang penguasa tidak boleh dikaitkan dengan etika dan moral. Dalam situasi yang terdesak, etika dan moral hanyalah sesuatu yang bersifat ideal, ketimbang realitas yang sedang terjadi. Dalam sejarah selanjutnya, teori kekuasaan Machiavelli diadopsi dan dipraktikkan oleh sebagian besar penguasa di seluruh dunia.

Teori kekuasaan yang diuraikan diatas relevan digunakan untuk membahas ambisi Belanda untuk menguasai kembali Indonesia melalui berbagai upaya yang dilakukannya. Begitu pula teori kekuasaan juga relevan digunakan untuk membahas perjuangan Sri Sultan melawan Belanda dalam agresi Militer II dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, karena kemerdekaan yang diraih Indonesia baik secara *de facto* maupun *de jure* telah mendapat pengakuan dari beberapa Negara. Dalam hubungan ini terlihat secara jelas kebenaran *hukum rimba* yang dicetuskan Maciavelli, bahwa pihak yang kuatlah yang mampu bertahan menjaga eksistensinya. Dominasi dan kekuasaan dalam menguasai suatu Negara oleh bangsa lain yang sangat merugikan harkat dan martabat kemanusiaan suatu bangsa harus dilawan dengan keberanian sehingga perdamaian dunia dapat diwujudkan. Jadi untuk mewujudkan perdamaian harus berperang.

2.1.2 Teori Patriotisme

Kata “patriotisme” berasal dari gabungan dua kata, yaitu “patria” dan “isme”. Kata Patria berubah menjadi patriot yang mengandung arti sikap kepahlawanan atau sikap cinta tanah air, sedangkan isme merupakan akhiran dalam kata yang menandakan suatu paham, ajaran, atau kepercayaan. Mengacu pada asal katanya tersebut, maka pengertian patriotisme adalah suatu paham, ajaran, atau asas mengenai kesetiaan dan semangat cinta terhadap tanah air. Patriotisme sangat berhubungan dengan nasionalisme, namun keduanya memiliki definisi yang berbeda.

Liputan6.com, menyatakan bahwa patriotisme adalah salah satu bentuk pengabdian dan dukungan kuat seseorang terhadap negaranya. Dengan begitu, patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Patriotisme juga mengandung makna semangat cinta tanah air. Sikap patriotism merupakan sikap cinta tanah air yang membuat seseorang rela berkorban dan pantang menyerah dalam membela bangsa dan negaranya.

Ciri-ciri Sikap Patriotisme

Orang yang menganut patriotism disebut dengan patriotik, yaitu orang-orang yang cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi negaranya. Adapun ciri-ciri patriotism yaitu: (1) adanya rasa simpati terhadap bangsa. Seorang patriotic mampu mencintai bangsa dan negaranya tanpa mengharapkan keuntungan pribadi pada dirinya sendiri. Hal ini dapat menciptakan rasa solidaritas didalam diri seseorang demi mencapai kesejahteraan bangsanya; (2) patriotisme dapat membuat seseorang mampu melihat kekuatan dan kelemahan Negara dan bangsanya; (3) patriotisme dapat menciptakan rasa solidaritas terhadap sesame sehingga mampu mencapai kesejahteraan bangsa; (4) rasa cinta tanah air merupakan nilai budaya bangsa dan merupakan modal penting bagi perjuangan untuk mencapai cita-cita bangsa; (5) patriotisme membuat kita merasa memiliki identitas diri sehingga dapat melihat, dan mengembangkan watak dan kepribadian bangsa; (6) patriotism bersifat terbuka sehingga kita dapat melihat bangsa dalam konteks dunia, bersedia untuk terlibat didalamnya, serta bersedia belajar dari bangsa lain demi kemajuan bangsa.

Sementara ciri-ciri seorang patriotic adalah sebagai berikut: (1) cinta akan tanah air dan bangsa; (2) pantang menyerah; (3) rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; (4) memiliki jiwa pembaharuan; (5) selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Tujuan Patriotisme

Beberapa tujuan dari sikap patriotism diantaranya (1) secara umum, patriotisme bertujuan untuk menjaga persatuan dan keutuhan Negara dari ancaman, baik ancaman dari dalam maupun luar; (2) patriotism bertujuan untuk menghapus ekstrimisme (tuntutan yang berlebihan) dari hak dan kewajiban warga Negara, baik individu maupun kelompok; (3) patriotisme juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa didalam diri setiap warga Negara sehingga Negara dapat menghadapi berbagai ancaman; (4) paham yang menganut rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa bertujuan untuk menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama warga Negara.

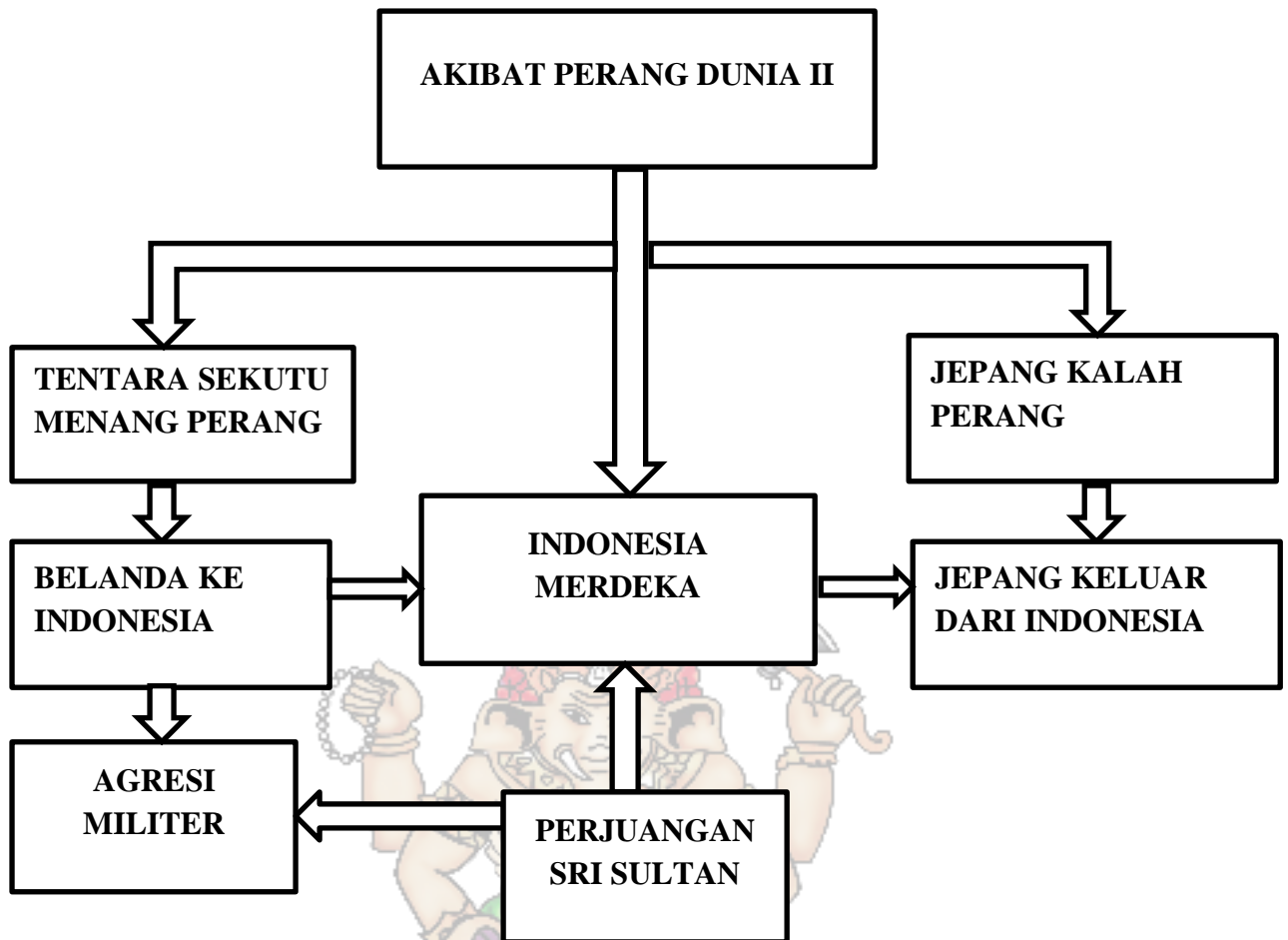
Ciri-ciri patriotisme, dilansir dari situs Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), dalam sejarah Indonesia bagaimana para pejuang

merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan gagah berani. Banyak pejuang yang gugur, berapa banyak harta yang hancur, tetapi bangsa Indonesia tidak kenal kata menyerah. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengusir penjajah. Mereka berjuang dengan didorong kecintaan terhadap kemerdekaan, tanah air, bangsa dan Negara Indonesia. Adapun ciri-ciri patriotism : (1) cinta tanah air; (2) rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara; (3) menempatkan persatuan, kesatuan serta keselamatan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan; (4) berjiwa pembaharu; (5) tidak kenal menyerah

Teori Patriotisme yang diuraikan diatas relevan digunakan untuk membahas ambisi Sri Sultan dalam Mempertahankan Republik Indonesia dalam Agresi Militer Belanda II. Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, Sri Sultan dengan tegas menunjukkan sikap patriotismenya. Pada pidatonya Sri Sultan menegaskan bahwa walaupun beliau mengenyam pendidikan Barat tetapi beliau tetap orang Jawa. Sikap patriotismenya kemudian diperkuat setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dilaksanakan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Selain itu Sri Sultan juga mendahulukan kepentingan rakyat Yogyakarta demi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini terlihat bahwa sikap kepahlawanan Sri Sultan sangat terlihat jelas dalam mempertahankan Republik Indonesia.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah Suatu tahapan yang digunakan oleh peneliti untuk memperjelas proses jalannya suatu penelitian serta arah dan tujuannya. Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan dengan suatu faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian. Dalam penelitian kerangka berpikir harus konsep atau variable penelitiannya serta harus secara perinci secara juga menguraikan keterkaitan antara variable tersebut (Juliansah Noor 2015:76)



BAGAN 2.1

Keterangan:

Akibat Berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, Kekuasaan Jepang atas Indonesia berakhir setelah berkuasa selama kurang lebih 3,5 tahun (1942-1945). Tahap demi tahap pasukan Jepang ditarik mundur dari Indonesia. Tentara Sekutu dibawah pimpinan Jendral Christison kemudian mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dengan tujuan utama melucuti persenjataan tentara Jepang.

Kedatangan Sekutu ternyata diboncengi oleh NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) yang akan berusaha kembali berkuasa di Indonesia. Proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno sebagai wujud pernyataan kemerdekaan tidak sedikitpun dihiraukan oleh Belanda. Belanda masih menginginkan kekuasaan di negeri yang kaya akan potensi sumber daya alam ini.

Konflik RI-Belanda setelah kedatangan kembali pemerintah Hindia Belanda ternyata mendapat tanggapan dari dunia internasional. Inggris mendesak segera diadakannya perundingan gencatan senjata sebelum menarik semua pasukan mereka dari Jawa dan Sumatera pada bulan Desember 1946. Pada tanggal 12 November 1946 Indonesia untuk

pertama kali diakui secara *de facto* dalam Perundingan Linggarjati. Hal ini merupakan alasan bagi beberapa negara adikuasa seperti Inggris dan AS untuk mengakui Indonesia secara *de facto*, menyusul beberapa negara seperti Mesir dan Yordania yang telah memberi pengakuan *de facto* dan *de jure* sebelum perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda mengingkari Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan militer yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda Pertama. Terjadinya peristiwa ini membuat Dewan Keamanan PBB turun tangan dengan membentuk *Committee of Good Offices* (Komisi Jasa Baik) yang terdiri dari wakil-wakil dari AS, Australia dan Belgia dalam upaya penyelesaian masalah tersebut.

Akhirnya perundingan dimulai kembali dan Persetujuan Renville disepakati pada bulan Januari 1948. Perundingan yang dilaksanakan di atas Kapal USS Renville tersebut ternyata belum final, masih dilanjutkan dengan perundingan-perundingan yang lain. Tuntutan-tuntutan Belanda atas RI semakin kuat dan menekan. Belanda menuntut pembubaran TNI, salah satu atribut kedaulatan dan kemerdekaan RI yang utama. Belanda sangat tangkas melakukan perang totalnya, walaupun dalam kondisi gencatan senjata. Mereka terus menyerang dalam bidang politik dan ekonomi untuk meruntuhkan Republik Indonesia. Kebuntuan antara kedua belah pihak membawa Belanda pada keputusan untuk melaksanakan aksi militer yang sesungguhnya pada tanggal 19 Desember 1948, dimana hal tersebut dikenal dengan Agresi Militer Belanda Kedua. Pasukan Belanda mulai menyerang Yogyakarta dengan pesawat-pesawat tempur mereka. Mula-mula mereka melumpuhkan lapangan udara Maguwo yang akan digunakan untuk pendaratan pasukan mereka. Pesawat pembom dan penembak roket Belanda P. 51 dan Spitfires mulai menjinakkan Yogyakarta dengan serangan yang dilakukan oleh Brigade Marinir Belanda.

Kekuatan militer Belanda secara cepat dapat menguasai Kota Yogyakarta. Kabinet RI segera bersidang untuk membahas serangan Belanda tersebut. Sebelum Presiden, Wakil Presiden beserta petinggi-petinggi yang lain ditawan oleh Belanda, dalam sidang telah diputuskan bahwa akan dibentuk pemerintahan darurat di Sumatera oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan TNI yang akan bergerilya dengan dipimpin oleh Panglima Besar Soedirman. Sementara itu Sri Sultan dibatasi gerakannya oleh Belanda terbatas hanya di Keraton saja. Menyadari hal ini Sri Sultan tidak tinggal diam. Inilah saatnya Sri Sultan memimpin perlawanan terhadap Belanda, meski dalam upaya tersebut Sri Sultan berperan sebagai pengatur strategi di Keratonnya. Pelaksana-pelaksana di lapangan dipimpin oleh Letkol Soeharto, dimana ia berperan sebagai pemimpin dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Sri Sultan juga tetap berkomunikasi dengan pejuang-pejuang yang

lain, meski hanya melalui para kurir yang menyamar sebagai abdi dalem ketika keluar dan masuk Keraton.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan prediksi yang mengacu pada sebuah teori atau sejumlah teori yang dijadikan kerangka atau model teori menurut Wellm dalam Yatim Rianto (1996:13) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Sedangkan Moleong (1990:41) menyatakan hipotesis adalah analisis perbandingan antara kelompok tidak hanya menghasilkan kategori, tetapi mempercepat adanya hubungan yang disimpulkan antara kelompok tersebut. Yang perlu ditekankan disini ialah bahwa status hipotesis adalah sesuatu yang diuji diantara hubungan kategori dan kuasanya. Hipotesis senantiasa diverifikasi sepanjang penelitian itu berlangsung.

Dengan demikian hipotesa merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah yang diungkap. Jawaban atau dugaan yang mengacu pada fakta-fakta yang diajukan, dan yang jawabannya adalah kebenaran sementara. Jawaban ini bisa terbukti dan bisa tidak. Hipotesis berpedoman pada latar belakang, rumusan masah, dan ruang lingkup penelitian tersebut. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat hipotesa yaitu:

Yang melatar belakangi Keterlibatan Sultan Hamengku Buwono IX melakukan perjuangan dalam Agresi Militer Belanda II yaitu di sebabkan karena kebencian Sultan Hamengku Buwono IX terhadap Belanda karena menganggap Belanda adalah bangsa penjajah yang telah membawa kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia.

Bentuk Perjuangan Sultan Hamengku Buwono IX dalam melakukan perjuangan pada Agresi Militer Belanda II yaitu memindahkan ibu kota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta.

Makna Perjuangan Sultan Hamengku Buwono IX dalam melakukan perjuangan pada Agresi Militer Belanda II yaitu sikap nasionalisme dan komitmen yang ditunjukkannya sebagai bukti nyata bahwa Sultan Hamengku Buwono IX sangat mencintai NKRI